

# PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Sukma Selvianny Tolley<sup>1</sup>, Ridwan, dan Muh.Yunus Kasim<sup>2</sup>

*sukmavrilla19@gmail.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarja Universitas Tadulako*

## Abstract

*The research is aimed to find out and analyze simultaneous and partial influence of government internal controlling system on the performance of government officials that include controlling environment, risk assesment, controlling activities, information and communications, and monitoring of service qualities. The research verifies the relationship of variables by involving 84 respondents who were selected through census method. The rest result show that: 1). controlling environment, risk assessment, controlling activities, information and communication, and monitoring of service qualities simultaneosly have influence on the performance of the goverment working units in Sigi; 2) controlling environment has significant influence on the performance of the goverment working units in Sigi; 3) risk assesment has significant influence on the performance of the goverment working units in Sigi; 4) controlling activities have significant influence on the performance of the goverment working units in Sigi; 5) information and communication have significant influence on the performance of the goverment working units in Sigi.*

**Keywords:** *government internal controlling system and performance og goverment working units in Sigi*

Tuntutan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta terbentuknya organisasi sektor publik yang tepat-guna (efektif-efisien), terbuka (transparan) dan akuntabel yang bersih serta bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme; secara merta telah memunculkan kebutuhan akan sebuah pola pengawasan intern menerus dalam sebuah sistem pengendalian intern yang baik dan terukur. Pemerintah dari sudut pandang sebuah organisasi tidak bisa menghindari kenyataan akan kebutuhan tersebut diatas, setidaknya agar tindakan pengendalian intern tersebut dapat menjamin bagi terbentuknya keyakinan memadai (*reasonable assurance*) terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Hakekat pengendalian yang secara sederhana memiliki pengertian mengatur fungsi kontrol, pada akhirnya akan membentuk pola kerja terukur dengan pertanggung-jawaban jelas, dimana setiap penyimpangan, pemborosan,

penyelewengan, halangan, kekeliruan dan kegagalan telah dapat dihitung dan diperkirakan (prediksi) secara terukur.

Pemerintah yang adalah salah satu bagian dari sebuah negara, dalam peranannya sebagai penerima mandat untuk melaksanakan amanat rakyat, dituntut agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di segala sektor; seperti yang telah diatur dalam undang undang negara. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sendirinya akan menjadi tuntutan penting bagi aparatur pemerintah, dimana dalam pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun telah pula menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, sehat dan terukur pada setiap lini pemerintahan.

Penerapan otonomi daerah melalui pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus

kepentingan masyarakatnya beserta wilayahnya sendiri secara otonom, serta merta berimbang pada hak otonom pengelolaan keuangan daerah. Tuntutan yang kemudian wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah atas kewenangan otonom tersebut adalah keharusan untuk dapat memberikan pertanggung-jawabannya atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pemberlakuan Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 58 (ayat 2) Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menjadi landasan hukum bagi terbitnya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dimana Sistem Pengendalian Intern yang dimaksud adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ini harus dan wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 1 (ayat 10) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) terdiri lima unsur, yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern. Kelima unsur ini akan saling berpengaruh dan bersinergi satu sama lainnya. Dalam prosesnya pengendalian akan melebur dan menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh bawahannya; ini berarti faktor terpenting yang menjadi pondasi dari pengendalian intern adalah faktor manusia atau Sumber Daya Manusia didalam organisasi. Sementara itu, Hanif (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern sebagai sebuah sistem tidak lagi kegiatannya hanya berpusat kepada faktor manusia saja, akan tetapi melibatkan seluruh unsur- unsur dalam organisasi termasuk kebijakan, peraturan-peraturan, standar-standar dan prosedur.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ini adalah langkah konkrit untuk membentuk *built in control* artinya pengawasan *by system*. Siapapun pemegang amanah birokrasi pemerintahan, maka dengan sendirinya sistem yang akan melakukan pengawasan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dalam arti sempit dan mencapai visi, misi dan tujuan bernegara dalam arti seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Ketika internal control system yang dijabarkan dalam SPIP bekerja; dimana secara otomatis pula berlaku fungsi pengawasan, maka setiap insan birokrasi pemerintahan suka tidak suka akan bekerja "*under control*". Selanjutnya, apabila kondisi ini dipertahankan maka terciptalah *internal control culture* artinya sistem pengendalian intern menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan di Indonesia.

## METODE

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah mengukur variabel-variabel yang mempengaruhi Kinerja SKPD. Variabel yang akan diteliti adalah sistem pengendalian intern pemerintah.

Jenis penelitian ini penjelasan (*Explanatory/confirmatory research*), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel

dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sensus, yaitu penyebaran kuesioner dilakukan pada semua populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan SKPD yang berjumlah 84 orang.

Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka, memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai ke jawaban sangat tidak setuju. Masing-masing item pernyataan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang paling rendah dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang paling tinggi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model linear berganda yang digunakan pada penelitian ini memenuhi persyaratan seperti: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heterokedastisitas. Adapun uji asumsi klasik adalah sebagai berikut:

**a. Uji Normalitas**

Normalitas bertujuan mengkaji apakah dalam sebuah model regresi variable dependen (terikat), variable independen (bebas) atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyeberan data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

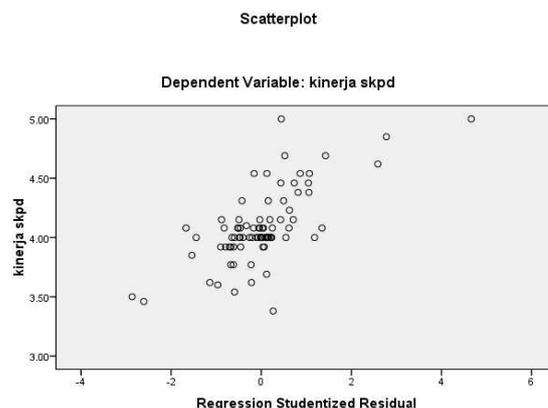
Dengan bantuan program statistik SPSS 16 hasil Uji Normalitas data dapat dilihat pada titik sebaran data yang dihasilkan dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah data normal.

**b. Uji Multikolinearitas**

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah diantara variable bebas (*independen*) tidak saling berkorelasi atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variable. Menurut Gunawan (2001:235) untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih besar dari angka 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineratis.

**c. Uji Heterokedastisitas**

Hasil uji asumsi *heterokedastisitas* dari model regresi yang terbentuk tersaji pada gambar berikut :



**Gambar 1. Regresi Standardized Prected Value**

Berdasarkan Gambar 1. terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini memberi makna bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi *heteroskedastisitas*.

**Hasil Regresi**

Regresi Linear Berganda merupakan salah satu alat statistik Parametrik dengan fungsi menganalisis dan menerangkan keterkaitan antara dua atau lebih faktor penelitian yang berbeda nama, melalui pengamatan pada beberapa hasil observasi (pengamatan) di berbagai bidang kegiatan. Berkaitan dengan penelitian ini alat analisis

Statistik Parametrik Regresi Linear Berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable indeviden ( $X_1, X_2, X_3,$  dan  $X_4$ ) terhadap variable dependen ( $Y$ ). Dalam konteks penelitian ini Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan pengendalian ( $X_1$ ), penilaian resiko ( $X_2$ ), kegiatan pengendalian ( $X_3$ ), informasi dan komunikasi ( $X_4$ ) serta pemantauan ( $X_5$ ) terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.

Sesuai hasil analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan bantuan komputer SPSS For Wind Release 16,0 diperoleh hasil-hasil penelitian dari 84 responden dengan dugaan pengaruh kelima variabel independen (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan) terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, dapat diketahui hasil perhitungan sebagai berikut

**Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Berganda**  
**Dependen Variabel Y = Kinerja SKPD**

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T	Sig
C = Constanta	0,200	0,449	0,446	0,657
$X_1$ = Lingkungan Pengendalian	0,247	0,071	3,495	0,001
$X_2$ = Penilaian Resiko	0,168	0,069	2,432	0,017
$X_3$ = Kegiatan Pengendalian	0,234	0,065	3,618	0,001
$X_4$ = Informasi dan Komunikasi	0,147	0,043	3,408	0,001
$X_5$ = Pemantauan	0,146	0,053	2,773	0,007
R- = 0,718				
R-Square = 0,515	F-Statistik = 16,584			
Adjusted R-Square = 0,484	Sig. F = 0,000			

Sumber: Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 0,200 + 0,247X_1 + 0,168X_2 + 0,234X_3 + 0,147X_4 + 0,146X_5$$

Persamaan diatas menunjukkan, variabel independen yang dianalisis berupa variabel ( $X_1, X_2, X_3, X_4$  dan  $X_5$ ) memberi pengaruh terhadap variable independen ( $Y$ ) model analisis regresi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi dapat dilihat sebagai berikut:

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan:

1. Untuk nilai constanta sebesar 0,200 berarti kinerja Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Kabupaten Sigi sebelum adanya variabel independen adalah sebesar 0,200.
2. Lingkungan pengendalian ( $X_1$ ) dengan koefisien regresi 0,247 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara lingkungan pengendalian dan kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah. Artinya semakin baik

fghkertop pengendalian yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi maka akan semakin naik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.

3. Penilaian resiko ( $X_2$ ) dengan koefisien regresi 0,168 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara penilaian resiko dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya semakin baik penilaian resiko yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi maka akan semakin naik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada.
4. Kegiatan pengendalian ( $X_3$ ) dengan koefisien regresi 0,234 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara kegiatan pengendalian dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya semakin baik kegiatan pengendalian yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi maka akan semakin naik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada .

5. Informasi dan komunikasi ( $X_4$ ) dengan koefisien regresi 0,147 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara informasi dan komunikasi dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya semakin baik informasi dan komunikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Sigi maka akan semakin naik kinerja.
6. Pemantauan ( $X_5$ ) dengan koefisien regresi 0,146 ini berarti terjadi pengaruh yang positif antara pemantauan dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Artinya semakin baik pemantauan yang ada maka akan semakin naik kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.

**a. Pengujian Hipotesis Pertama**

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X$ ) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen ( $Y$ ) berarti semua variabel bebasnya, yakni lingkungan pengendalian ( $X_1$ ), penilaian resiko ( $X_2$ ), kegiatan pengendalian ( $X_3$ ), informasi dan komunikasi ( $X_4$ ) serta pemantauan ( $X_5$ ) dengan variabel tidak bebasnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi yakni:

Dari Tabel 1 terlihat hasil uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai Adjusted R-Square = 0,484 atau = 48,40%. Hal ini berarti bahwa sebesar 48,40% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kelima variabel bebas, selebihnya variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.3 dari hasil perhitungan diperoleh  $F_{hitung} = 16,584$  pada taraf nyata  $\alpha = 0,05$  atau  $\alpha < 0,05$ . Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $F = 0,000$ . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya.

Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa: Lingkungan pengendalian, penilaian resiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi berdasarkan hasil Uji-F ternyata *terbukti*.

**b. Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam**

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

*1. Lingkungan pengendalian ( $X_1$ )*

Untuk variabel lingkungan pengendalian, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,247, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,001. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa: Lingkungan pengendalian berpengaruh dan signifikan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

*2. Penilaian resiko ( $X_2$ )*

Untuk variabel penilaian resiko, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,168, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,017. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel penilaian resiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sigi. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa: Penilaian resiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja satuan Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

### 3. Kegiatan pengendalian ( $X_3$ )

Untuk variabel kegiatan pengendalian, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,234, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,001. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kegiatan pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Dengan demikian maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa: Kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

### 4. Informasi dan Komunikasi ( $X_4$ )

Untuk variabel informasi dan komunikasi, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,147, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,001. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Dengan demikian maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa: Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

### 5. Pemantauan ( $X_5$ )

Untuk variabel pemantauan, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,146, sementara tingkat signifikansi  $t$  sebesar 0,007. Dengan demikian nilai  $\text{sig } t < 0,05$  pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pemantauan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Dengan demikian maka hipotesis keenam yang menyatakan bahwa: Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, berdasarkan hasil uji-t ternyata terbukti.

Menganalisis data penelitian diatas selanjutnya akan diuraikan Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi sebagai berikut :

### **Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi**

Berdasarkan analisis terhadap pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern diperoleh hasil bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil uji  $F = 0,0000$  dengan nilai koefisien regresi masing masing lingkungan pengendalian sebesar 0,247, penilaian resiko sebesar 0,168, kegiatan pengendalian sebesar 0,234, informasi dan komunikasi sebesar 0,147 serta pemantauan pengendalian intern sebesar 0,146 ini berarti terjadi hubungan yang positif antara kelima variabel dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten sigi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari setiap satuan kerja perangkat daerah kabupaten sigi secara umum telah memahami kelima unsur dari sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini juga didukung oleh teori yang dikemukakan oleh COSO dalam BPKP (2013) yang menyatakan bahwa :

“Sistem pengendalian intern terdiri dari lima komponen utama yang saling berkaitan. Komponen ini bersumber dari cara manajemen (pimpinan) menyelenggarakan tugasnya dan oleh karena itu komponen ini menyatu (*built in*) dan terjalin (*permeated*) dalam proses bisnis. COSO merumuskan lima komponen tersebut sebagai : a) Lingkungan Pengendalian (*control enviroment*), b) Penilaian resiko (*risk assesment*), c) Aktivitas Pengendalian (*control activities*), d) Informasi dan Komunikasi (*information and communication*), dan e) Pemantauan (*monitoring*).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intren melekat sepanjang kegiatan serta dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. Oleh sebab itu latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai petunjuk pelaksanaan paket reformasi keuangan negara menuju *Good Governance* atau tata kelola yang baik dan *Clean Goverment*.

Pelaksanaan kegiatan yang didasari oleh sistem pengendalian yang baik diharapkan tidak saja untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik tetapi lebih jauh dapat menciptakan kualitas yang baik pula dari setiap satuan kerja perangkat daerah sehingga kedepannya pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi masalah krusial yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Penerapan sistem pengendalian intern pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sigi telah didukung oleh komitmen penegakan etika dan integritas yang dilakukan oleh pimpinan, hal ini dapat dilihat dengan keinginan pimpinan untuk memberikan segala upaya yang ada untuk membantu kesuksesan organisasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2014) yang mengatakan bahwa

sistem pengendalian intern dapat mencegah usaha-usaha penyelewengan yang disengaja.

Sabeni dan Gozali (1995) mendefinisikan pengawasan intern merupakan suatu alat pengawasan dari pimpinan organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan, sedangkan Ratnawati dan Arnold (2011) mengatakan bahwa fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah selanjutnya dikatakan fungsi pemeriksaan internal yang baik akan menghasilkan kinerja institusi yang lebih tinggi.

Implikasi dari penelitian diharapkan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat ditingkatkan dan dipertahankan guna peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sigi sehingga dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta pelaksanaan paket reformasi keuangan negara dapat benar-benar terjadi sesuai harapan masyarakat.

### **Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.**

Berdasarkan hasil uji parsial variabel lingkungan pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.. Hal ini membuktikan bahwa unsur lingkungan pengendalian yang baik memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dari setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah membawa suasana yang nyaman bagi setiap penyelenggara pemerintah untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara sangatlah berperan besar. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Andrian (2014) yang mengatakan bahwa lingkungan

pengendalian adalah merupakan salah satu faktor terbesar yang mendukung terciptanya sistem pengendalian intern. Selain lingkungan kerja yang kondusif, adanya kebijakan yang sehat terhadap pembinaan sumber daya manusia yang ada juga sangat diperlukan. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah hubungan kerja yang baik antara instansi dengan aparat pengawas intern.

Arens et.al (dalam Soleha 2014) mengatakan bahwa pengendalian intern memainkan peran yang signifikan bagi organisasi terhadap terciptanya *good corporate governance*, hal tersebut menjadikan perusahaan untuk memenuhi praktek pengelolaan perusahaan yang baik. Proses pengendalian intern harus dipandang secara realistis, yang memberikan jaminan yang *reasonable* yang melegitimasi bahwa tujuan akan tercapai. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Maulida (2014) yang mengatakan bahwa lingkungan pengendalian yang baik sangat berperan dalam mengatasi kendala-kendala dalam setiap tugas sehingga setiap tugas dapat selesai sesuai target.

### **Pengaruh Penilaian Resiko Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi**

Berdasarkan hasil uji parsial variabel penilaian resiko mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Hal ini membuktikan bahwa penilaian resiko memiliki pengaruh yang positif dalam upaya meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pernyataan serta arahan yang spesifik dari setiap instansi terhadap pegawai sangat diperlukan agar setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsi instansinya. Keselarasan antara tujuan kegiatan setiap instansi dengan rencana strategik instansi juga sangat diperlukan untuk menunjang penyelesaian kegiatan dengan baik. Hal yang sama juga dikemukakan Andriani (2014) yang mengatakan bahwa pelaksanaan sistem

pengendalian intern dilakukan dalam upaya untuk pencapaian misi dan tujuan organisasi dengan menjaga efisiensi operasional dan menjaga kesesuaian dengan kebijakan manajemen serta mengevaluasi tingkat pelaksanaan dalam organisasi yang tentunya memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan resiko. Azlina (2014) juga menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

Selain itu keharmonisan dikalangan pegawai baik antara pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan di tiap instansi juga menggambarkan terciptanya suasana kerja yang nyaman sehingga setiap kegiatan juga dapat berjalan dengan baik, sumber daya yang cukup juga menjadi faktor penunjang lainnya. Diterapkannya penilaian resiko yang baik diharapkan dapat mencegah secara dini terhadap penyimpangan selain itu dapat membantu manajemen dalam menyiapkan tindakan pengendalian yang harus diambil jika terjadi penyimpangan. Hal ini juga didukung oleh Maulida (2014) yang mengatakan bahwa penilaian resiko yang baik yang dilakukan pada tiap tahapan pelaksanaan proses pekerjaan dan dilakukan secara terus menerus akan meminimalkan resiko yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

### **Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.**

Berdasarkan hasil uji parsial variabel kegiatan pengendalian mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sigi. Kelima aspek yang menunjang kegiatan pengendalian ini adalah : a) Reviu atas kinerja instansi, b) Pengendalian

atas pengelolaan sistem informasi, c) Otorisasi atas setiap transaksi, d) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas setiap transaksi dan e) Dokumentasi atas setiap transaksi dan kejadian penting.

Arens et al, (dalam Soleha, 2014) mengatakan bahwa aktivitas pengendalian umumnya berhubungan dengan kebijakan dan prosedur yang bersinggungan dengan: (1) Pemisahan tugas yang memadai; (2) Otorisasi yang sesuai dari transaksi dan aktivitas; (3) Dokumen dan catatan yang memadai; (4) Pengendalian fisik atas aset dan catatan; dan (5) Pemeriksaan independen atas kinerja. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prima Yuda (2014) yang mengatakan bahwa semakin baik pengendalian intern maka kinerja akan semakin baik.

Pelaksanaan reuiu terhadap kinerja instansi perlu dilakukan untuk meninjau sejauh mana setiap instansi telah melakukan kegiatan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi juga sangat dibutuhkan oleh setiap instansi sehingga informasi-informasi yang sifatnya sangat rahasia tidak mudah bocor ke publik, selain kedua hal tersebut otorisasi atas setiap transaksi juga menjadi satu keharusan yang suka atau tidak harus dilakukan oleh setiap instansi untuk mengurangi terjadinya penyimpangan. Kegiatan pengendalian yang baik diharapkan akan membantu manajemen dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

### **Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi**

Berdasarkan hasil uji parsial variabel informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa Informasi dan Komunikasi berpengaruh

positif untuk menunjang kinerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sigi. Penyediaan berbagai bentuk sarana komunikasi sangatlah diperlukan disamping pemanfaatannya, selain itu setiap informasi harus terus menerus dikelola dan dikomunikasikan dengan baik serta diperbassharui secara terus menerus. Pelaksanaan seluruh unsur dalam sistem pengendalian intern secara baik akan mempermudah manajemen dalam pelaksanaan kegiatan yang diharapkan akan membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

Yuwono (2005), mengatakan bahwa pengendalian dapat dilakukan dengan sistem akuntansi dengan menerapkan sistem informasi akuntansi dan berbagai bentuk aplikasi komputer dengan karakteristik *double entry* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih reliabel., sehingga dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul dapat dipecahkan dengan informasi yang berkualitas dan terkomunikasikan dengan baik untuk dapat dilakukan pengambilan keputusan yang tepat.

### **Pengaruh Pemantauan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi**

Berdasarkan hasil uji parsial variabel pemantauan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, kelima aspek yang terdapat dalam pemantauan merupakan faktor yang menunjang terciptanya kinerja yang baik. Pemantauan yang berkelanjutan serta evaluasi yang terpisah yang selalu dilaksanakan oleh instansi sangat berguna untuk melihat sejauh mana instansi telah merespon hasil audit dan melakukan tindak lanjut terhadap setiap temuan auditor. Setelah melakukan proses pemantauan ini diharapkan setiap satuan kerja

perangkat daerah membuat laporan hasil pemantauannya untuk menjadi acuan bagi aparat pengawas intern pemerintah ketika melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil audit.

Sependapat di atas disampaikan pula oleh Budiharto (2008: 13) bahwa pengawasan melekat (*built in control*) adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung "terhadap pekerjaan " dan "hasil kerja" bawahannya, agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian Fuadi (2008: 15) juga menunjukkan bahwa dalam pengawasan preventif dijadikan sebagai pengendalian awal terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan demikian realisasi anggaran yang dilakukan akan lebih terarah dalam pencapaian sasaran anggaran dan penyimpangan lebih terminimalisir karena pelaksanaan anggaran telah diatur dengan prosedur pelaksanaan.

Diterapkannya sistem pengendalian intern yang efektif di Kabupaten Sigi diharapkan dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan praktek-praktek yang sehat dan akan berdampak pada semakin meningkatnya kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada dan pada akhirnya dapat membawa dampak positif terhadap kehidupan seluruh masyarakat Kabupaten Sigi

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Sigi. Berdasarkan analisis terhadap pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.

2. Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Berdasarkan analisis dapat dinyatakan bahwa variabel lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
3. Pengaruh Penilaian Resiko Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Berdasarkan analisis terhadap variabel penilaian resiko dapat dinyatakan bahwa variabel penilaian resiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
4. Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi berdasarkan hasil analisis terhadap variabel kegiatan pengendalian dapat dinyatakan bahwa variabel kegiatan pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
5. Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel Informasi dan Komunikasi dapat dinyatakan bahwa variabel informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.
6. Pengaruh Pemantauan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi. Berdasarkan hasil analisis terhadap variabel Pemantauan dapat dinyatakan bahwa variabel pemantauan mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi.

### Rekomendasi

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sigi, maka saran yang penulis dapat berikan untuk Pemerintah Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil olahan data statistik didapat nilai mean terendah pada variabel lingkungan pengendalian adalah indikator peran aparat pengawas intern telah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini di Kabupaten Sigi peran APIP masih kurang efektif hal ini antara lain disebabkan oleh masih kurangnya jumlah auditor APIP yang dimiliki. Pada variabel penilaian resiko indikator dukungan terhadap sumber daya yang cukup memiliki nilai mean yang rendah untuk itu sumber daya yang ada di kabupaten sigi masih perlu diperbaiki. Variabel kegiatan pengendalian indikator yang memiliki nilai mean rendah adalah melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting untuk itu dalam pelaksanaan setiap kegiatan perlu selalu dilakukan otorisasi terhadap setiap transaksi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Pada variabel informasi dan komunikasi indikator yang masih perlu diperbaiki adalah memperbaharui sistem informasi secara terus menerus, harapannya dengan selalu memperbaharui sistem informasi setiap SKPD selalu dapat menyajikan dan mengakses informasi terbaru. Pada Variabel pemantauan indikator yang masih perlu diperbaiki adalah melakukan evaluasi terpisah. Pelaksanaan evaluasi diperlukan oleh SKPD untuk menjamin telah dilakukannya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan auditor internal.

2. Bagi penelitian selanjutnya, wilayah penelitian dapat diperluas dalam hal ini tidak hanya di kabupaten sigi. Selain itu dapat menambah jumlah sampel dan menambahkan variabel lain yang belum diteliti seperti Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Ridwan, S.E, M.Si,Ak,CA selaku Ketua Tim pembimbing dan Dr. Muh. Yunus Kasim, S.E, M.Si selaku pembimbing anggota atas bantuan, petunjuk dan arahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

### DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, Nini 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Audit Internal sebagai Variabel Moderating pada Universitas Tadulako. *Tesis*
- Azlina, Nur dan Ira Amelia 2014. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember 2 Des 2014 – Vol. 12 No. 2 hal 32-42*
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Refika Aditama. Bandung.
- Maulida, Oktaviyani Nurul. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN). Studi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I. *Jurnal*

*Ilmu & Riset Akuntansi 2014 Vol. 3 No. 2 hal 1-19*

- Randal, Alvin, Amir 2011, *Jasa Audit dan Assurance*, Salemba Empat, Jakarta
- Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Republik Indonesia, 2014. *Undang – undang No, 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*
- Sabeni, A dan Gozali I, 1995. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintah.* Edisi 4, Yogyakarta : BPFE
- Soleha, Nurhayati, 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Etikonomi April 2014 Vol. 13 No. 1 hal 21-34*
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Alfabeta : Bandung
- Sugiyono, 2014. *Statistik Untuk Penelitian.* Alfabeta: Bandung
- Suprihanto, Jhon. 2000, *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan,* Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE